

PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Wahyudi 

Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Tanjungpura, Pontianak
Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi No.1, Pontianak, Kalimantan Barat, 78124
E-mail: wahyudi@ekonomi.untan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta pengeluaran untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yakni menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Data penelitian ini mencakup data 34 provinsi di Indonesia dengan rentang waktu sepanjang tahun 2015 – 2019. Adapun alat analisis yang digunakan dengan menggunakan persamaan estimasi data panel. Model terbaik untuk mengestimasi hubungan antar variabel penelitian baik untuk Persamaan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah *Model Fixed Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan maupun pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan maupun pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah provinsi untuk memfokuskan alokasi belanja pada pemenuhan kebutuhan akan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal yang memiliki potensi sumber daya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat sehingga pada giliran berikutnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat direkomendasikan kepada pemerintah untuk menyeimbangkan alokasi dana dengan memfokuskan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, peningkatan taraf hidup, dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Kata Kunci: pengeluaran kesehatan, pengeluaran pendidikan, pengeluaran infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pemerintah provinsi

1. PENDAHULUAN

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang efektif pada berbagai sektor publik. Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi alokasi sumberdaya, menstimulasi perekonomian untuk tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, dan menjaga stabilitas perekonomian (Wahyudi, 2020). Beberapa penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi (Loizides & Vamvoukas, 2005).

Pengeluaran pemerintah dibutuhkan dalam upaya pembentukan modal manusia. Di samping itu, pengeluaran pemerintah juga dibutuhkan untuk meningkatkan akumulasi modal, menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan output perekonomian (Rosen, 2014; Sukirno, 2013). Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah juga diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azwar, 2016).

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan.

Masalah kesenjangan yang menjadi fokus perhatian pembangunan adalah ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Istiqamah et.al. (2018) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia justru mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan. Tetapi penelitian Maurilla et.al. (2022) menemukan tidak terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dilihat dari faktor penyebabnya, ketimpangan pendapatan di negara berkembang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi, dan persebaran investasi (Todaro & Smith, 2015). Sebagian besar pemerintahan yang modern menerapkan kebijakan fiskal redistributif, dimana penghasilan orang kaya dikenakan pajak dengan tarif yang tinggi, sehingga orang miskin dapat merasakan redistribusi pendapatan (Hosea & Susilawati, 2023).

Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun bila negara tersebut semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (an inverse U shaped pattern).

Kuznets menjelaskan disparitas dalam pembagian pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal pembangunan. Pada tahap berikutnya, proses pembangunan ekonomi mengalami kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang kemudian pada tahap berikutnya berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan trend positif, dan rata-rata tumbuh sebesar 5,03% per tahun selama periode 2015-2019 (BPS, 2022). Berbeda dengan kondisi nasional, dalam dua tahun terakhir terdapat beberapa provinsi yang mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir. Secara nasional ketimpangan pendapatan mengalami sepanjang 2015 - 2017. Pada tahun 2015, indeks gini Indonesia sebesar 0,402 dan turun menjadi 0,391 pada tahun 2017, kemudian tahun 2019 turun lagi menjadi 0,382. Berbanding terbalik dengan kondisi nasional, beberapa daerah justru menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam dua tahun terakhir (2018-2019). Kenaikan indeks gini terjadi di 12 provinsi, dengan peningkatan tertinggi di Provinsi Bali dan D.I. Yogyakarta, sedangkan terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara (BPS, 2022).

Dalam upaya meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah menjadi komponen penting dari instrumen kebijakan fiskal. Hal ini sejalan dengan beberapa telaah teoritis yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi dan sosial akan berdampak terhadap tiga hal, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perbaikan distribusi pendapatan.

Sepanjang 2019 - 2021, pengeluaran pemerintah di beberapa provinsi mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta; Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah (DJPK, 2022). Dilihat dari sarannya, pengeluaran pemerintah dibagi dalam 2 kelompok. Pertama, pengeluaran pemerintah yang secara langsung memberi kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Sasaran ini dapat diwujudkan melalui pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan, karena kedua sektor ini menyangkut kebutuhan dasar manusia. Kedua, pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan sasaran ini, pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan untuk membenahi infrastruktur. (Berarzi, & Marzo, 2015; Coady, & Dizioli, 2017).

Abdullah & Rusdarti (2017), Muhammed (2014), serta Olulu, dkk (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Ethiopia, Nigeria, maupun negara maju di Eropa memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Ifa & Guetat (2018) di Maroko dan studi Al-Shatti (2014) di Yordania menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB per kapita. Studi oleh Shahril (2011) di Malaysia mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, studi Al-Shatti (2014) di Yordania serta Mudaki & Masaviru (2012) di Kenya menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Studi Wahyuni, dkk (2014) di Provinsi Bali menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kesenjangan pendapatan, artinya semakin besar pengeluaran pemerintah maka kesenjangan pendapatan juga semakin tinggi.

Menurut Todaro & Smith (2015), faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan distribusi pendapatan di negara berkembang adalah: a) pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, b) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, c) inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang, d) investasi.

Pengukuran ketimpangan pendapatan umumnya menggunakan parameter koefisien Gini (IG). Koefisien Gini (gini ratio) adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Sebagai ukuran ketimpangan agregat, koefisien Gini dimulai dari 0 s/d 1. Umumnya koefisien Gini pada negara yang derajat ketimpangan tinggi berkisar antara 0,50 s/d 0,70, sedangkan untuk negara yang distribusi pendapatannya relatif merata angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah provinsi untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan, pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Teori Keynes mengenai pengeluaran pemerintah dilatarbelakangi gagasan umum bahwa pengangguran yang terjadi secara terus menerus disebabkan oleh penurunan total investasi sektor swasta. Menurut Keynes (Muhammed, 2014), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes beranggapan bahwa

perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi mendorong peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan tidak menggunakan data lag, padahal sebagian besar proyek-proyek pemerintah khususnya proyek di bidang pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur memerlukan waktu untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data untuk variabel-variabel tersebut menggunakan data lag 1 tahun.

2. RUANG LINGKUP

Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Investasi pemerintah pada kedua sektor publik tersebut akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berikutnya akan memperbaiki standar kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Penyediaan infrastruktur menjadi syarat utama bagi proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan infrastruktur diharapkan akan dapat menambah kapasitas produksi dan memberikan efek multiplier dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur akan membuka daerah-daerah yang terisolasi, mengurangi biaya produksi, mendorong munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi baru seperti industri dan pasar, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya beli konsumen.

Di negara berkembang, perhatian terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Kedua-duanya sama penting, namun sulit diwujudkan dalam waktu yang bersamaan. Fenomena pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan pertama kali diperkenalkan Kuznets (Kuncoro, 2010).

Distribusi pendapatan (*income distribution*) merupakan salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara/daerah. Pembangunan ekonomi tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat dengan pendapatan tinggi dan berpendapatan rendah yang tidak terlalu menyolok dalam perekonomian.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih jauh tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan serta pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini dimaksudkan

agar dapat berkontribusi sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam rangka menentukan langkah yang potensial serta kebijakan terkait upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan pendapatan.

3. BAHAN DAN METODE

Objek penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yakni terdiri atas 34 provinsi. Selengkapnya tentang data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam sub bab berikut.

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa indikator keuangan (pengeluaran pemerintah) dan indikator makroekonomi (pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan) Pemerintah Provinsi di Indonesia. Data sekunder yang dipergunakan tersebut bersifat runtut waktu (*time series*) sepanjang tahun 2015 - 2019.

Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan metode observasi non perilaku, yaitu dilakukan dengan mengamati secara langsung dokumen maupun data yang tersedia. Sampel penelitian mencakup 34 provinsi (cross section). Adapun konsep analisis data menggunakan data panel (*pooled data*). Data panel atau panel data adalah gabungan dari data runtut waktu dan data antar individu. Dalam penelitian ini data variabel bebas berupa data lag (t-1) dengan pertimbangan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk bidang pendidikan dan kesehatan maupun infrastruktur tidak dapat dirasakan pengaruhnya secara langsung baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa semua jenis pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi variabel ekonomi lainnya setelah pengeluaran pemerintah tersebut berjalan minimal satu tahun.

3.2 Analisis Data

Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda, dengan persamaan estimasi sebagai berikut:

Model Regresi 1:

$$Gr_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PPE_{it-1} + \alpha_2 PPI_{it-1} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Model Regresi 2:

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 PPE_{it-1} + \beta_2 PPI_{it-1} + \beta_3 Gr_{it-1} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Gr = Pertumbuhan Ekonomi

IG = Gini Rasio

β_0 = Konstanta

$\beta_1; \beta_2, \beta_3$ = Koefisien

PPE = Pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan

PPI = Pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur

ϵ_{it} = Tingkat kesalahan (error term)

i = Silang tempat (cross section)

t = Runtut waktu (time series)

$t-1$ = Jeda waktu (time lag)

Pengujian masing-masing model estimasi regresi dilakukan dengan uji model terbaik (CEM, FEM, dan REM), uji asumsi klasik, dan uji statistik (uji signifikansi).

4. PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi data panel, selanjutnya dijelaskan hubungan dan pengaruh variabel independen dan variabel dependen.

4.1 Hasil Estimasi Model Regresi-1

Pemilihan model estimasi regresi diperlukan untuk mendapatkan model terbaik. Pada penelitian ini, pemilihan model estimasi regresi-1 menggunakan uji Chow dan uji Hausman, yang hasil kedua uji tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Pemilihan Model Estimasi Terbaik-untuk Model 1

	<i>Uji Chow</i>	<i>Uji Hausman</i>
<i>F</i>	2,204947	
<i>Chi square</i>		6,467986
<i>Prob</i>	0,0009*	0,0417*
<i>Keputusan</i>	<i>Fixed effect</i>	<i>Fixed effect</i>

* sign pada $\alpha = 5\%$

Pengujian normalitas dengan melihat nilai probabilitas Jarque-Bera diperlukan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas model estimasi regresi-1 menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera $0,197699 > 0,05$; yang berarti data penelitian berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji multikolinieritas dilakukan untuk mendeteksi adanya permasalahan korelasi antar variabel bebas. Berdasarkan hasil uji masing-masing variabel bebas yakni PPE dan PPI diketahui bahwa nilai dari $\chi^2 > 0,80$; sehingga dapat disimpulkan model estimasi untuk regresi-1 bebas dari masalah multikolinieritas.

Adapun uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji suatu model regresi yang terdapat ketidaksamaan variance residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel bebas yakni PPE dan PPI $> \alpha (0,05)$; dan dengan demikian variabel PPE dan variabel PPI lolos dari masalah heteroskedastisitas.

Hasil uji regresi data panel pada penelitian ini menggunakan pendekatan model fixed effect. Hasil pengujian model estimasi regresi-1 disajikan pada Tabel 2 berikut. Nilai koefisien variabel PPE sebesar 0,2176; artinya apabila pengeluaran pemerintah provinsi untuk

pendidikan dan kesehatan meningkat sebesar 1 Milyar Rupiah, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat sebesar 0,2176% *ceteris paribus*.

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Regresi-1

Variabel	Koefisien	t-hitung	Prob.
C	5,386495	75,545423	0,0000
PPI $t-1$	0,217663	3,746222	0,0015
PPE t_2-1	0,097555	2,366518	0,0294
R-squared	0,9206		
Adjust Rsquared	0,8999		

* *sign* $\alpha = 5\%$

Nilai koefisien variabel PPI sebesar 0,0975; artinya apabila pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur meningkat sebesar 1 Milyar maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat sebesar 0,0975%, *ceteris paribus*.

Nilai probabilitas PPE adalah $0,0015 < 0,05$. Nilai tersebut membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan, nilai probabilitas PPI adalah $0,0294 < 0,05$. Nilai tersebut membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, hasil estimasi menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,920684 atau 92,06%. Artinya kemampuan variasi variabel pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan, serta pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur dalam menjelaskan variasi variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 92,06%; sedangkan sisanya 7,94% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2 Hasil Estimasi Model Regresi-2

Pemilihan model estimasi regresi-2 menggunakan uji Chow dan uji Hausman, yang hasil kedua uji tersebut ditsajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji Pemilihan Model Estimasi Regresi-Terbaik untuk Model 2

	<i>Uji Chow</i>	<i>Uji Hausman</i>
<i>F</i>	17,399612	
<i>Chi square</i>		13,693128
<i>Prob</i>	0,0000*	0,0034*
<i>Keputusan</i>	<i>Fixed effect</i>	<i>Fixed effect</i>

* sign pada $\alpha = 5\%$

Hasil uji normalitas model estimasi regresi-2 menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera $0,193666 > 0,05$; yang berarti data penelitian berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas untuk masing-masing variabel bebas yakni PPE, PPI, dan Gr tidak ada nilainya $> 0,80$; sehingga dapat disimpulkan model estimasi regresi-2 bebas dari masalah multikolinieritas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel bebas yakni PPE,

PPI dan $Gr > \alpha$ (0,05); dan dengan demikian variabel PPE, variabel PPI, maupun variabel Gr terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Selanjutnya, hasil pengujian model fixed effect estimasi regresi-2 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Model Estimasi Regresi-2

Variabel	Koefisien	Standar		Prob.
		Deviasi	t-hitung	
C	0,372181	0,005168	72,011380	0,0000
X ₁ -1	-2,33E-09	5,43E-10	-4,290976	0,0000
X ₂ -1	-4,89E-09	1,27E-09	-3,850393	0,0002
Y1	-0,000583	0,000495	-1,177777	0,2414
R-square				0,82543

* sign pada $\alpha = 5\%$

Nilai koefisien variabel PPE sebesar -0,000000002; artinya apabila pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan turun sebesar 1 Milyar Rupiah, maka ketimpangan pendapatan di Indonesia akan meningkat sebesar 0,000000002 dengan asumsi pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap.

Nilai koefisien variabel PPI sebesar -0,000000004; artinya apabila pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur turun sebesar 1 Milyar Rupiah maka ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat sebesar 0,000000004 dengan asumsi pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Nilai koefisien variabel Gr sebesar -0,000583; artinya apabila pertumbuhan ekonomi turun 1 persen maka ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat sebesar 0,000583 poin dengan asumsi pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Nilai probabilitas PPE adalah $0,0000 < 0,05$. Nilai tersebut membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Nilai probabilitas PPI adalah $0,0294 < 0,05$. Nilai tersebut membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sedangkan nilai probabilitas Gr adalah $0,2414 < 0,05$. Nilai tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Selanjutnya, hasil estimasi untuk nilai R² menunjukkan bahwa nilai R² yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,825438 atau 82,54%. Artinya kemampuan variasi variabel pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan, pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan variasi variabel ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar

82,54%; sedangkan sisanya 17,46% dijelaskan oleh variasi variabel lain di luar model penelitian.

4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi Untuk Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen yang efektif untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penyediaan barang dan jasa publik di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan komponen investasi publik yang penting dalam rangka meningkatkan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, sehingga sumber daya manusia (SDM) cerdas dan sehat semakin bertambah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap pendidikan dan perluasan layanan kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Disamping itu, peningkatan proporsi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan sebagai pemenuhan standar dan alokasi belanja untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib layanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah (*mandatory spending*).

Secara empiris, hasil penelitian ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Abdullah & Rusdarti (2017) di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan juga studi yang dilakukan oleh Kyissima, Pacific & Ramadhan (2017) di Tanzania, serta studi Farooq (2016) di Pakistan, yang menemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor publik terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Lahirushan & Gunsekara (2015) mengungkapkan bahwa pengeluaran publik pada bidang pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara di Asia.

Secara spesifik, hasil studi Kwendo & Muturi (2015), Al-Shatti (2014) di Yordania, dan studi Muhammed (2014) di Ethiopia, menemukan bahwa pengeluaran publik untuk kesehatan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi lainnya dilakukan Gemmell, dkk (2012), menemukan bahwa pengeluaran publik untuk pendidikan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi Untuk Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Infrastruktur memiliki peran strategis dalam proses pembangunan yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Secara

mikro, ketersediaan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi, sedangkan dalam konteks ekonomi makro mempengaruhi peningkatan produktivitas modal. Tidak jarang pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dijumpai pada wilayah dengan ketersediaan infrastruktur yang relatif memadai. Untuk itu, diperlukan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar dalam upaya meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan deskripsi di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi riil yang menunjukkan terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran pencapaian tujuan pembangunan, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan perekonomian secara umum. Keberadaan infrastruktur publik (sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar (jalan, pelabuhan, dermaga, perumahan/pemukiman, sanitasi, listrik, dan air bersih) yang memadai akan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini secara empiris sejalan dengan studi Kyissima, Pacific & Ramadhan (2017) di Tanzania, dan studi Torki (2016) di Yordania, yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor publik terutama pada bidang infrastruktur memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Termasuk pula temuan studi Abdullah & Rusdarti (2017) di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, studi Jelilov & Musa (2016) di Nigeria, dan studi Al-Shatti (2014) di Yordania, yang menemukan bahwa pengeluaran publik untuk infrastruktur dan fasilitas publik memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara spesifik, hasil studi Lahirushan & Gunsekara (2015) di beberapa negara di Asia, studi yang dilakukan Kwendo & Muturi (2015) di beberapa negara di Afrika, dan studi Gangal & Gupta (2013) di India, menemukan bahwa pengeluaran publik untuk infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi Untuk Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi ketimpangan pendapatan (income disparity) antar kelompok pendapatan. Peningkatan pendapatan per kapita mencerminkan tahap perkembangan perekonomian suatu negara/daerah, namun peningkatan tersebut belum menjamin distribusi pendapatan menjadi merata. Oleh karenanya, diperlukan intervensi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang terjadi, diantaranya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah.

Peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pemerataan akses fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat.

Dalam ruang lingkup penelitian empiris, hasil penelitian ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Jianu (2018) di Uni Eropa, yang menemukan hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan dengan ketimpangan pendapatan. Menurutnya, peningkatan 1% pengeluaran pemerintah (dinyatakan sebagai bagian dari PDB) untuk pendidikan menyebabkan penurunan koefisien Gini sebesar 0,024 poin, sedangkan peningkatan 1% pengeluaran pemerintah untuk kesehatan menyebabkan penurunan koefisien Gini sebesar 0,019 poin. Telaah mendalam dari studi yang dilakukan Ifa & Guetat (2018) di Tunisia dan Maroko, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif terhadap pendapatan (PDB per kapita).

4.6 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi Untuk Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

Pengeluaran pemerintah dalam upaya penyediaan infrastruktur dasar yang merata tentunya akan semakin memperluas akses masyarakat akan dan sarana dan prasarana publik yang layak, memacu tumbuhnya sektor-sektor ekonomi produktif, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini relevan dengan studi yang dilakukan Ulu (2018) di 21 negara OECD, yang mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial (pendidikan, kesehatan, dan prasarana umum) positif mempengaruhi ketimpangan pendapatan, dimana ketimpangan pendapatan menurun pada saat pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial meningkat.

4.7 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercemrin dari capaian pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, berarti kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Akan tetapi yang diperlukan tidak hanya sebatas angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih dititik-beratkan pada pihak mana atau siapa yang menciptakan pertumbuhan

tersebut. Jika sebagian kecil masyarakat yang menikmati hasilnya, maka pertumbuhan tidak mampu memperkecil ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Fakta yang mengungkapkan bahwa hubungan positif dan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya berdampak positif terhadap distribusi pendapatan.

Secara empiris, hasil penelitian ini sesuai studi yang dilakukan oleh Huang, dkk (2015), yang menemukan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan dapat berupa hubungan positif atau negatif. Di beberapa negara berpendapatan rendah (*low income developing countries*), terdapat hubungan negatif antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya di beberapa negara dengan pendapatan tinggi (*high income developing countries*), justru ditemukan terdapat hubungan positif antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Studi Ali (2014) di Pakistan juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Beberapa hasil studi tersebut memberikan bukti komparatif di beberapa negara tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan atau penekanan pada ketimpangan pendapatan. Tingkat ketimpangan yang tinggi pada tahap awal masa pembangunan ekonomi akan menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi, sementara pada awal masa pertumbuhan ekonomi tertentu akan menjadikan ketimpangan pendapatan meningkat.

5. KESIMPULAN

Pengeluaran pemerintah pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan maupun pengeluaran pemerintah provinsi untuk pembagunan infrastruktur memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta untuk infrastruktur juga memberikan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

6. SARAN

Keterbatasan penelitian initerletak pada belum mempertimbangkan variabel perbedaan geografis wilayah – wilayah di Indonesia yang mana terdapat wilayah – wilayah yang memiliki kondisi geografis yang tidak mudah seperti pegunungan dan perbukitan untuk dilakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sarana publik lainnya. Untuk wilayah-wilayah seperti ini, tentu saja dengan besaran pengeluaran provinsi, baik untuk bidang pendidikan dan kesehatan serta pengeluaran infrastruktur, akan memiliki dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dibandingkan dengan provinsi dengan kondisi geografis

daratan. Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk dapat membedakan provinsi dengan wilayah geografis yang sebagian besar terdiri atas daratan, perairan (laut dan sungai), dan pegunungan atau perbukitan. Di samping itu, keterbatasan penelitian ini juga terletak pada tidak membedakan pengeluaran pendidikan secara lebih spesifik, misalnya pengeluaran pendidikan untuk memberikan gaji kepada tenaga guru honorer dan pengeluaran untuk pembangunan gedung-gedung sekolah. Kedua pengeluaran ini tentu saja akan memberikan pengaruh yang bis ajadi berbeda terhadap kesenjangan pendapatan masyarakat meupun tingkat pertumbuhan ekonomi.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.A., & Rusdarti (2017). The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia, Malaysia and Singapore. *Journal of Economic Education*. Vol. 6 (No.1).
- Al-Shatti, A.S. (2014). The Impact of Public Expenditure on Economic Growth in Jordan. *International Journal of Economics and Finance*; Vol. 6 (No. 10)
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YPKN.
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan* Vol. 20 No. 2, 149-167.
- Berarzi, N., & Marzo, F. (2015). The Elasticity of Poverty with Respect to Sectoral Growth in Africa. *Jornal Wiley* Vol. 63, No 1.
- Coady, D., & Dizioli, A. (2017). Income Inequality And Education Revisited: Persistence, Endogeneity, And Heterogeneity. *IMF Working Paper*, WP/17/126
- Farooq, N. (2016). Public Expenditures And Economic Growth: A Case Study of Pakistan. *American Journal of Social and Management Sciences*, 7(2), 33-41.
- Gangal, V.L.N., & Gupta, H. (2013). Public Expenditure And Economic Growth: A Case Study Of India. *Global Journal of Management and Business Studies*, 3(2), 191-196.
- Gemmell, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2012). Does The Composition Of Government Expenditure Matter For Economic Growth? *World Bank Working Paper Series*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Dasar-dasar ekonometrika (basic econometrics, 5th ed.)* (Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, & Carlos Mangungsong, Penerjemah). Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Huang, H. C. R., Fang, W., Miller, S. M., & Yeh, C. C. (2015). The Effect of Growth Volatility on Income Inequality. *Economic Modelling*, 45, 212–222.
- Hosea, S. & Susilawati, N. (2023). Systematic Literature Review Terhadap Konsep Optimal Tax. *Sebatik*, 27(1), 415-430. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2241>.

- Ifa, A., & Guetat, I. (2018). Does public expenditure on education promote Tunisian and Moroccan GDP per capita? ARDL approach. *The Journal of Finance and Data Science* 4
- Istiqamah, S. & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* Vol. 7. No. 3, 111 – 126.
- Jianu, I. (2018). The Impact of Government Health and Education Expenditure On Income Inequality In European Union. *Theoretical and Applied Economics*. Special Issue, 121–134.
- Jelilov, G., & Musa, M. (2016). The Impact Of Government Expenditure On Economic Growth In Nigeria. *Sacha Journal of Policy and Strategic Studies*, 5(1), 15-23.
- Juanda, B. (2009). *Ekonometrika: Pemodelan dan Pendugaan*. Institut Pertanian Bogor (IPB) Press.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik. Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kwendo, C.M., & Muturi, W. (2015). The Effect Of Public Expenditure On Economic Growth In The East African Community. *Journal of Business Management and Economics*, 3, 9-13.
- Kyissima, K.H., Pacific, Y.K.T., & Ramadhan, A.A. (2017). Government Expenditure And Economic Growth In Tanzania: A Time Series Analysis. *International Journal of Development and Economic Sustainability*, 5 (1), 11-22.
- Lahirushan, K. S., & Gunasekara, W. V. (2015). The Impact Of Government Expenditure On Economic Growth: A Study Of Asian Countries. *International Journal of Social, Behavioural, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*, 9 (9), 3152-3160.
- Maurilla, A., Suriani, S., & Nasir, M. (2022). Do Poverty and Economic Growth Matter for Income Inequality Reduction in Yogyakarta Province?. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.23, No.2, 308 – 322.
- Mudaki, J. & Masaviru, W. (2012) Does The Composition of Public Expenditure matter to Economic Growth for Kenya? *Journal of Economics and Sustainable Development*. 3 (3).
- Muhammed, A. (2014). Government Spending for Economic Growth in Ethiopia. *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol.5, No.9.
- Olulu, R.M, Erhieyovwe, E.K, & Andrew, U. (2014). Government Expenditures and Economic Growth: The Nigerian Experience. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol. 5 No 10
- Rosen, H.S. (2014). *Public Finance*, Tenth Edition, Global Edition, The McGraw-Hill Series in Economics.
- Shahril, K. (2011). The Association between Government Expenditure and Economic Growth in Malaysia. *Ritsumeikan Asia Pacific University*
- Sukirno, S. (2013). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Todaró, M.P., & Smith, S.C. (2015). *Economic Development*. 12th Edition. United Kingdom: Pearson Addison Wesley.
- Torki, M. A. (2016). The Impact of Government Expenditures On Economic Growth In Jordan 1980-2013. *International Business Research*, 9 (1), 99-105
- Ulu, M.I. (2018). The Effect of Government Social Spending on Income Inequality In OECD: A Panel Data Analysis, (91104).
- Wahyudi. (2020). *Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020, 113-114.
- Wahyuni, I.G., Sukarsa, M. & Yuliarmi, N. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Universitas Udayana